

Detak Jam Gadang

Pembangunan dan Kemiskinan

Oleh: Iwan Sulisty



PEMBANGUNAN dan kemiskinan dan kejahatan merupakan variabel yang saling terkait. Lilitan ketiganya amat rumit dan berliku.

Ketiga persoalan itu ada lah masalah klasik yang pas li terjadi di mana-mana. Karena keterbatasannya dalam berbagai hal (teknologi, pendidikan, ekonomi), bangsa-bangsa Indonesia untuk masih dikategorikan sebagai negara dunia ketiga (negara berkembang).

Dalam konteks kehidupan kemiskinan masyarakat Indonesia, jika kita lihat dalam Pancasila, keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan konsep yang amat penting. Keadaan sosial akan lebih "buruk" dan "hampa" apabila bangsa terbanyak masyarakat Indonesia dapat hidup secara layak dengan mendapatkan kebutuhan minimalnya sebagai manusia, sandang yang memadai, pangan yang cukup, hunian yang layak (bermutu) bagi manusia, listrik yang terjangkau oleh harga (bagi sebagian besar penduduk), akses kepada air minum yang sehat dan bersih, kesehatan pelayanan kesehatan yang memadai, pendidikan yang terjangkau, pekerjaan yang sama dalam memperoleh pelayanan, lapangan kerja baru, dan asuransi. Keadaan sosial bukanlah komunisme (sama-rasanya-rasanya).

Pembangunan dapat sebagai suatu proses yang bergulir (proses-menggulir) siapa henti. Ada karena pembangunan itu merupakan "kesuksesan" yang genteng, bukan tak serok pula yang menuliskan "komponen".

Dalam konteks antara pembangunan dan kejahatan, terdapat tiga benang merah: (1) proses pembangunan mampu menekan angka kejahatan; (2) proses pembangunan dapat "mengeliminasi" angka kejahatan; dan (3) proses pembangunan, tu san di merupakan suatu "kegiatan".

Karena itu, secara historis, dalam konteks peningkatan kesejahteraan penduduk Kota Bukittinggi terdapat pada satu tema tunggal: seberapa besar capaian pembangunan yang telah bergulir di Kota wisata ini? Apakah pembangunan yang telah dilaksanakan hanya menungkul pada satu sektor kehidupan saja? Atau apakah di balik pembangunan yang telah dicapai itu secara implisit menyisip suatu "kejahatan" terhadap kemanusiaan yang pada akhirnya bakal menimbulkan "kejahatan" dan kejahatan baru di masyarakat la pian bawah (grade-rut)?

Songoni (2007) menyatakan bahwa penyebab dan kemiskinan, lazimnya dijabarkan dua penjelasan: (1) mengaitkannya dengan aspek kebudayaan; (2) masalah sebagai hal yang disebabkan oleh struktur sosial suatu masyarakat tertentu.

Mengingat kedua penjelasan tersebut memuat kelemahan dan kekurangan, kita perlu merenungi sebuah konsep yang memperlebar kedua hal diatas, juga melihatnya baik di dalam konteks, maupun pada Struktur sosio-ekonomi dan kebudayaan di tingkat nasional, kita sebagai komunitas berdebat sejalan dengan daya mikardhi yang lebih luas.

Dalam kajian ini, kemiskinan jelas merupakan fenomena multifaset yang berkaitan dengan kondisi struktur sosial, kebudayaan di tingkat mikro, meso maupun makro seperti rumah tangga dan individu. Fenomena kemiskinan tersebut muncul, mikas, atau berkurang baik lepas dan kabijakan dan praktik kekuasaan negara (terlepas dari ideologi), dan/atau perubahan pasar yang bersifat tanpa batas lagi, serta peran "W" sosial.

Sejarah hal tersebut, perlu dikaji dan dikembangkan dalam perspektif komprehensif dan/atau sosial yang lebih luas dari melupakan di 9 dan di dalam "grandeur" (Soemanir, 2007, 2-113).

Dalam konteks antara pembangunan dan kejahatan, tabaka bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang memperhatikan keadannya (merata dan merata) pembangunan di semua pondu daerah, yang kemudian bakal menuliskan "kritisisme" atau yang menuliskan masyarakat, maka benang merah ketiga proses pembangunan merupakan suatu kejahatan di "niscaya" menjadi "sosiologi".

Penulis adalah AUSA Badan Otonom SUMA Universitas Indonesia